

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Strategi Pengembangan Wisata**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan mempermudah penafsiran serta memperoleh gambaran yang jelas tentang judul yang diangkat, maka ada beberapa yang perlu dijelaskan supaya tidak terjadi kerancuan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

##### **1. Strategi**

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategeia* (*stratos*= militer; dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai perang, di mana jendral dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Konsep Sun Tzu, Hannibal, dan Carl Von Clausewitz dalam konteks bisnis strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha suatu organisasi. Berdasarkan persepektif tersebut strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya.

##### **2. Pengembangan Wisata**

Pengembangan berasal dari kata kerja “berkembang” yang berarti mekar terbuka, menjadikan besar, menjadikan maju. Dalam hal ini,

pengembangan adalah membuat atau mengadakan atau mengatur sesuatu yang belum telah ada. Wisata secara etimologis wisata merupakan kata yang berasal dari bahasa sansekerta yang dalam bahasa Indonesia berarti perjalanan (travel). Namun, ada perbedaan medasar antara kata “wisata” dan “perjalanan”. Makna perjalanan adalah pergi dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan kata wisata mengandung arti sebagai perjalanan ke suatu tempat yang didorong untuk memenuhi kebutuhan rekreatif atau untuk keperluan yang bersifat edukatif. Sehingga, pemahaman wisata dapat dirumuskan sebagai perjalanan dan persinggahan yang dilakukan oleh manusia di luar tempat tinggalnya dengan motivasi atau tujuan tertentu, tetapi bukan untuk berpindah tempat tinggal atau menetap secara permanen di tempat yang dikunjungi tersebut.

Kemudian, menurut pakar kepariwisataan dari Swiss, yakni Prof. Hunkizer dan Prof. Krapf memberikan rumusan tentang kepariwisataan sebagai berikut; *“Tourism is the sum of fenomena and relationship arising from the travel and stay of nonresidents, in so far they do not lead to permanent residence and are not connected with any earning activity”*. Secara bebas bisa diterjemahkan sebagai berikut, “Kepariwisataan adalah keseluruhan gejala (fenomena) dan Hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia di luar tempat tinggalnya dengan maksud bukan untuk tinggal menetap

di tempat yang disinggahinya dan tidak berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan upah”.

Pada hakekatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.<sup>1</sup>

Dengan begitu, kepariwisataan juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif. Sebagai contoh adalah biaya transportasi, ongkos menginap, konsumsi, dan lainnya. Bukan kegiatan yang bersifat sebaliknya, yaitu mendatangkan uang. Sehingga, mereka yang melakukan perjalanan untuk bisnis atau pekerjaan meskipun mengandung unsur konsumtif tidak bisa dikategorikan sebagai kegiatan wisata. Lantaran, biaya yang dikeluarkan merupakan bagian dari pekerjaan yang mendatangkan uang.

Mengacu pada UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, ada beberapa definisi yang dibuat untuk memperjelas cakupan dalam dunia kepariwisataan. Pertama, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang

---

<sup>1</sup> Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 3.

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Lalu, Kepariwisata adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah daerah, dan pengusaha. Sedangkan Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.<sup>2</sup>

### 3. Desa Wisata

Desa wisata adalah desa yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya, dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana sehingga siap untuk menerima dan menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut, serta mampu menggerakkan aktifitas ekonomi pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.<sup>3</sup> Secara spesifik pengembangan desa wisata dapat diartikan

---

<sup>2</sup> Sapta Nirwandar, *Building Indonesia WOW Indonesia Tourism and Creative Industry* (Jakarta: Gramedia, 2014), 73-74.

<sup>3</sup> T. Prasetyo Hadi Atmoko, "Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman", *Media Wisata*, 2 (2014), 147.

sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata.<sup>4</sup>

#### 4. Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan sektor pariwisata perlu dilakukan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar dengan adanya kegiatan pariwisata dapat mendorong masyarakat secara aktif dalam pembangunan untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang diinginkan. Pembangunan sektor pariwisata ini merupakan suatu kegiatan yang menggali segala potensi pariwisata, yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang apabila digabungkan dan dikelola dengan baik akan memberikan manfaat bagi keduanya. bisa dikatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Dari sudut organisasi dan yang diperdagangkan bagi masyarakat yang sedang berkembang, industri pariwisata adalah sarana perkembangan satu *Agen Of Change*.<sup>5</sup> Jadi bisa dikatakan bahwa melalui pariwisata masyarakat bisa melakukan perubahan. Masyarakat yang dahulunya terpinggirkan, kurang diberdayakan setelah ada upaya pengembangan pariwisata dalam penelitian ini adalah desa wisata menjadi lebih diberdayakan dengan pelibatan mereka dalam pengeolaan dan kegiatan desa wisata. Tentu hal ini akan menciptakan suatu masyarakat yang lebih maju dan mandiri.

---

<sup>4</sup> Made Heny Urmila Dewi, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali", *Kawistara*, 2 (2013), 132.

<sup>5</sup> Sajogyo, et. al., *Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), II : 177.

Dalam mengembangkan desa wisata masyarakat harus memiliki suatu kejelasan sikap tentang keinginannya untuk menaikkan mutu kehidupan *the quality of life* dan juga kejelasan pengertian tentang mutu kehidupan itu sendiri.<sup>6</sup> Bila semuanya sudah jelas maka upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui pengembangan desa wisata juga akan jelas. Kewaspadaan dan kehatian juga diperlukan karena dalam pelaksanaannya nanti akan menemui banyak hambatan. Namun apapun hambatan tersebut harus diselesaikan dengan berpegang pada tujuan awal yakni pengembangan desa wisata untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluru dan berkeadilan.

Dalam tulisan ini pengembangan pariwisata lebih menitikberatkan pada pengembangan wisata minat khusus yaitu desa wisata. Pembangunan yang dilakukan pemerintah yang selama ini berlangsung lebih banyak dilakukan di kota-kota saja, sehingga masyarakat desa kurang bisa merasakan manfaat dari pembangunan ini. Untuk itu masyarakat desa melalui pengembangan wisata minat khusus ini bisa di berdayakan agar lebih maju dan mandiri.<sup>7</sup>

## **5. Srategi Pengembangan Desa Wisata**

Pengembangan desa wisata dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini harus memperhatikan tiga hal, yakni menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang,

---

<sup>6</sup> Ibid., 177.

<sup>7</sup> Mohtar Mas'ood, *Politik Birokrasi dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 31.

memperkuat potensi dan daya tarik yang dimiliki serta melindungi masyarakat (persaingan yang sehat). Strategi yang perlu dilakukan salah satunya melalui *community enterprises* yaitu meningkatkan dan memperluas kegiatan usaha-usaha berbasis komunitas. Hal ini diharapkan dapat memicu peningkatan kesejahteraan berbasis pada swadaya serta kekuatan ekonomi serta membantu proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. *community enterprises* ini berperan antara lain dalam:

- a) Mengembangkan potensi dan kemampuan dengan pengetahuan yang telah berkembang dalam masyarakat sehingga dapat merangsang tumbuhnya kepercayaan, kemandirian dan kerja sama.
- b) Membantu mengembangkan teknologi lokal, sehingga dapat mengurangi ketergantungan teknologi.
- c) Menciptakan wahana untuk latihan peningkatan ketrampilan sumber daya manusia dan menumbuhkan kembangkan jiwa kewiraswastaan dan swadaya.
- d) Menciptakan peluang kerja di pedesaan sehingga dapat menarik kelebihan angkatan kerja.
- e) Memperkuat basis ekonomi pedesaan.
- f) Mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah, terutama desa dan kota sehingga dapat mengurangi arus migrasi ke kota.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Tadjudin Noer Effendi, "Strategi Pengembangan Masyarakat: Alternatif Pemikiran Reformatif" *Sosial Politik*, 2 (November 1999), 121.

## 6. Faktor Pendorong Pengembangan Pariwisata

Modal kepariwisataan (*tourism assets*) sering disebut sumber kepariwisataan (*tourism resources*). Suatu daerah atau tempat hanya dapat menjadi tujuan wisata kalau kondisinya sedemikian rupa, sehingga ada yang dikembangkan menjadi atraksi wisata. Apa yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan (*tourism resources*). Modal kepariwisataan itu mengandung potensi untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata, sedang atraksi wisata itu sudah tentu harus komplementer dengan motif perjalanan wisata. Maka untuk menemukan potensi kepariwisataan disuatu daerah orang harus berpedoman kepada apa yang di cari oleh wisatawan.<sup>9</sup>

Menurut Joyo Suharto modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada tiga, yaitu:

### a. Modal dari potensi alam

Maksud alam di sini adalah fisik, fauna dan floranya. Meskipun sebagai atraksi wisata ketiga-tiganya selalu berperan bersama, bahkan biasanya juga bersama-sama dengan modal kebudayaan dan manusia, akan tetapi tentu ada salah satu modal yang menonjol perannya. Alam menarik bagi wisatawan karena:

- 1) Banyak wisatawan tertarik oleh kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di alam terbuka.

---

<sup>9</sup> Nyoman S Pedit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Perdana* (Jakarta: Pradya Paramiata, 1994), 101.

- 2) Dalam kegiatan pariwisata jangka pendek, pada akhir pekan atau dalam masa liburan, orang sering mengadakan perjalanan sekedar untuk menikmati pemandangan atau suasana pedesaan atau kehidupan di luar kota.
  - 3) Banyak juga wisatawan yang mencari ketenangan di tengah alam yang iklimnya nyaman, suasananya tenang, pemandangannya bagus dan terbuka luas.
  - 4) Ada juga wisatawan yang menyukai tempat-tempat tertentu dan setiap kali ada kesempatan untuk pergi mereka kembali ke tempat-tempat tersebut.
  - 5) Alam juga menjadi bahan studi untuk wisatawan budaya, khususnya wisata budaya.
- b. Modal dari potensi kebudayaan

Maksud dari kebudayaan di sini adalah kebudayaan dalam arti luas, tidak hanya meliputi kebudayaan tinggi seperti kesenian atau perikehidupan keraton dan sebagainya, akan tetapi juga meliputi adat istiadat dan segala kebiasaan yang hidup ditengah-tengah suatu masyarakat. Modal kebudayaan itu penting untuk menarik wisata tamasya agar mereka dapat menikmati kebudayaan ditempat lain. Wisatawan tamasya (*pleasure tourist*) hanya tinggal disuatu tempat selam masih ada pemandangan lain, jadi harus ada cukup banyak atraksi untuk menahannya cukup lama disuatu tempat. Akan tetapi juga dapat diharapkan akan ada wisatawan

rekreasi, yang menghabiskan waktu sengangnya ditengah-tengah masyarakat dengan kebudayaannya yang dianggap menarik.

c. Modal dari potensi desa

Bahwa manusia dapat menjadi atraksi wisata dan menarik kedatangan wisatawan bukan hal yang luar biasa, meskipun gagasannya mungkin akan membuat orang tersentak, sudah tentu manusia sebagai atraksi wisata tidak boleh kedudukannya begitu direndahkan sehingga kehilangan martabatnya sebagai manusia.<sup>10</sup>

## **7. Faktor penghambat pengembangan pariwisata**

Menurut Moh Reza Tirtawinata selain masalah konsep pengembangan sebuah obyek pariwisata, masalah di dalam pengelolaan pariwisata juga perlu dicarikan jalan keluarnya. Berikut beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian diantaranya:

a. Potensi yang belum dikembangkan sepenuhnya

Potensi pariwisata yang besar dan tersebar diwilayah Indonesia hingga saat ini belum dikembangkan sepenuhnya. Hal ini disebabkan masih terbatasnya jangkauan dan kemampuan pengelolaan wisata. Selain itu, data mengenai potensi obyek wisata belum dimiliki dan belum ada inventarisasi obyek wisata yang telah ada. Permasalahan lain yang dihadapi dalam pengembangan wisata yakni belum siapnya jaringan transportasi ke lokasi, belum

---

<sup>10</sup> Sunardi Joyosuharto, *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam* (Yogyakarta: Liberty, 2001), 90.

memadainya fasilitas di tempat tujuan, serta belum disiapkannya lokasi tersebut untuk menjadi daerah pertanian sekaligus daerah wisata.

b. Promosi dan pemasaran pariwisata yang masih terbatas

Hingga saat ini usaha untuk memperkenalkan potensi wisata di Indonesia kepada wisatawan domestik ataupun mancanegara masih terbatas. Indonesia belum mampu menyediakan dana yang cukup besar untuk promosi maupun informasi kepariwisataan. Apabila dibandingkan dengan Negara ASEAN yang lain, dana promosi pariwisata di negara kita ternyata masih relatif rendah. Selain dana promosi, sarana promosi juga masih kurang. Usaha yang perlu dilakukan untuk mengawasi permasalahan ini adalah dengan memanfaatkan jalur-jalur promosi yang memungkinkan. Jalur promosi tersebut dapat berupa kerjasama dengan biro perjalanan pariwisata internasional, lembaga pariwisata pemerintah, penggunaan media audio visual, media cetak, dan lain-lain.

c. Kurangnya kesadaran pengunjung terhadap lingkungan

Pengunjung obyek wisata berasal dari berbagai usia dan kalangan yang mempunyai tingkah laku berbeda. Sebagian pengunjung memang telah memiliki kesadaran untuk menjadi pengunjung yang kesadaran akan lingkungannya masih kurang. Sejumlah dana yang telah dikeluarkan oleh pengunjung sebagai

bea masuk kadang di jadikan dasar bahwa pengunjung berhak melakukan apa saja yang disukainya. Kondisi ini problem tersendiri bagi pengelola wisata yang perlu diantisipasi.

d. Koordinasi yang belum berkembang

Sebagian besar wisata yang ada saat ini dikelola oleh instansi pemerintah dengan dana dan personalia yang terbatas. Padahal pengembangan pariwisata menyangkut berbagai instansi yang terkait baik swasta maupun pemerintah. Untuk itu, diperlukan adanya koordinasi dari semua pihak yang berkepentingan. Kurangnya koordinasi antar instansi yang bertanggung jawab mengelola seringkali mengakibatkan perkembangan pariwisata tidak sesuai dengan konsep yang seharusnya. Hal ini dapat menyulitkan pemantauan dan pengawasan terhadap pengembangan pariwisata selanjutnya.

e. Terbatasnya kemampuan manajerial dibidang pariwisata

Manajerial merupakan komponen yang dibutuhkan untuk semua kegiatan usaha. Manajemen yang baik dalam promosi, perencanaan, pemasaran, maupun pengembangan produk pariwisata sangat mempengaruhi keberhasilan upaya peningkatan arus pengunjung. Namun, pengelolaan pariwisata di Indonesia masih sangat terlihat kurang profesional. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya kuantitas maupun kualitas dari

tenaga kerja yang ada sehingga mereka kurang menguasai permasalahan.

f. Belum adanya aturan yang lengkap

Peraturan dan tata cara penguasaan pariwisata hingga saat ini belum garap secara utuh. Peraturan untuk pembuatan pariwisata belum tertuang secara teknis. Mengingat obyek ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara luas perlu kiranya dibuat pedoman sebagai acuan yang di gunakan semua pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan wisata.<sup>11</sup>

## 8. Pariwisata Dalam Ekonomi Islam

Pariwisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Ta'ala, menikmati indahnya alam sebagai pendorong manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup. Dalam konsep Islam perjalanan manusia dengan maksud dan keperluan tertentu di permukaan bumi (berpariwisata), harus diiringi dengan keharusan untuk memperhatikan dan mengambil pelajaran dari hasil pengamatan dalam perjalanannya.<sup>12</sup> Pariwisata dalam tradisi Islam dimulai dari kemunculan Islam sebagai agama universal, yaitu ketika dikenal konsep *ziyarah*, yaitu secara harfiah artinya berkunjung. Selanjutnya lahir konsep *dhi'yah*, yaitu tata krama berkunjung yang mengatur etika dan

<sup>11</sup> Oka A Yoeti, *Industri Pariwisata dan Peluang Kesempatan Kerja* (Jakarta: Pertja, 1999), 66.

<sup>12</sup> Aisyah Oktarini, "Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Jumlah Obyek Wisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2012), 38.

tata krama serta hukum hubungan sosial antara tamu (*dhaif*) dengan tuan rumah (*mudhif*). Konsep *ziyarah* tersebut mengalami perkembangan dan melahirkan berbagai bentuknya. *Ziyarah* yang dapat diartikan sebagai pariwisata atau *tour* dalam Islam, mengenal juga berbagai terminologi seperti, *assafar*, *arrihlah*, *intisyar*, dan istilah-istilah lain yang seakar dengannya. Istilah *safar* dijumpai anantara lain dalam QS.Al-Baqarah (2) ayat 184 yang berbunyi:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ  
لَّهُمْ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”<sup>13</sup>

Dalam pariwisata, Islam menggaris bawahi niat atau tujuan sebagai pembeda boleh tidaknya pariwisata tersebut. Niat atau tujuan yang *amar*

<sup>13</sup> QS. al Baqarah (2): 184.

*ma'ruf nahi munkar* dalam perjalanan pariwisata menjadikan berlakunya keringanan-keringanan yang diberikan Allah SWT kepada musafir. Tujuan dari ekonomi Islam adalah tujuan pengembangan, berproduksi dan menambah pemasukan negara, syar'i terkait dengan kebebasan pemutaran harta, keadilan dalam pemutaran harta. Dan tujuan utamanya adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dari tujuan di atas, maka perkembangan pariwisata dalam Islam haruslah sejalan dan sesuai dengan syari'at Islam yang dapat membuat semua golongan manusia tidak peduli kaya atau miskin menjadi sejahtera bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat.<sup>14</sup>

Pariwisata syari'ah merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan Muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata syari'ah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari Allah SWT. Terdapat berbagai faktor standar pengukuran pariwisata syari'ah dari segi administrasi dan pengolahannya untuk semua wisatawan yang dalam hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri yaitu:<sup>15</sup>

a. *Green* bisnis

Bisnis hijau (*green business*) adalah sebuah istilah yang mungkin tidak asing namun tak banyak orang yang paham. Sederhananya bisnis

---

<sup>14</sup> M. Hambali, "Tujuan Ekonomi Islam", *Dialetika*, 2 (Januari, 2013), 8.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 38.

hijau adalah sebuah pendekatan lingkungan dan sosial dalam menjalankan aktifitas bisnis agar terjadi keberlanjutan bagi generasi mendatang akan tersedianya sumber-sumber daya alam. Bayangkan jika aktifitas bisnis terus menerus merusak alam, anak cucu kita makin sengsara. Sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya melaksanakan aktifitas bisnis yang tidak menimbulkan efek negatif kepada masyarakat, lingkungan sosial dan perekonomian secara keseluruhan.

Menurut Sulistyowati *green business* (bisnis hijau) adalah pendekatan yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk mempertahankan kesinambungan dalam aktivitasnya yang berwawasan lingkungan. *Green business* memiliki makna sebagai sebuah proses untuk mengkonfigurasi ulang proses bisnis dan infrastruktur guna menghasilkan manfaat yang lebih baik bagi lingkungan manusia, nilai investasi ekonomis meningkatkan perilaku manusia, mengurangi eksploitasi atau penyalahgunaan sumber daya alam, mengurangi sampah lingkungan dan menurunkan kesenjangan sosial. Di dalam *green business*, ditekankan bagaimana cara untuk menerapkan atau menciptakan suatu sistem yang tujuannya mengurangi dampak negatif dari aktivitas suatu perusahaan.

b. Ramah lingkungan

Menurut Junaedi mendefinisikan, ramah lingkungan adalah sesuatu yang tidak merusak alam lingkungan di sekitarnya atau program

yang tidak membuat dampak buruk atau dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Untuk menanggulangi hal ini aktivis lingkungan giat menyuarakan konsep ramah lingkungan. Seperti adanya teknologi ramah lingkungan, gaya hidup ramah lingkungan, produk ramah lingkungan, energi ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Istilah ramah lingkungan dapat di artikan segala sesuatu yang sifatnya tidak merusak lingkungan melainkan menjaga dan melestarikannya.<sup>16</sup>

c. Nilai-nilai Islam

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, menciptakan bentuk pariwisata yang Islami pada prinsipnya harus ada kesesuaian praktek-praktek pariwisata dengan aturan-aturan ajaran Islam. Sektor pariwisata sebagai sebuah *mu'amalah* pada dasarnya dibolehkan sepanjang tidak ada praktek-praktek yang terlarang di dalamnya. Dalam kaidah fiqih disebutkan:

*“Hukum asal dari aktivitas (yang bersifat) mu'amalah adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang mengharamkannya”*

Sebagai sebuah *Muamalah* yang mubah (di bolehkan) maka sektor pariwisata sangat terbuka untuk di kembangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Sebagaimana yang telah di sebutkan sebelumnya. Sehingga di harapkan pariwisata dapat menjadi media pertumbuhan kesadaran, keimanan dan ketaqwaan serta mencapai nilai-nilai kehidupan yang luhur dan tinggi. Untuk

---

<sup>16</sup> Mutaminah, *Bedah Substansi Green Business* ( Bandung:Harian Suara Merdeka, 2011), 20-21.

mencapai tujuan diatas, maka pengelolaan pariwisata yang Islami perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nilai-nilai luhur agama menjadi amat penting sebagai motivator dan sumber nilai ideal dalam pengembangan kepariwisataan. Lebih-lebih lagi di dalam Islam, semua aktifitas yang baik dan mengandung nilai-nilai positif serta dilaksanakan dengan cara yang baik, selalu bernilai ibadah. Seperti dunia perhotelan haruslah di jauhi dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan budaya Islami. Selanjutnya di perlukan pengaturan tamu hotel yang harus benar-benar di jauhkan dari penggunaan obat terlarang dan sejalan dengan pencegahan praktek-praktek pergaulan bebas lintas kelamin yang tidak sah.
- 2) Nilai-nilai ideal dalam islam tentang disiplin, kebersihan, kesantunan, kesabaran, keikhlasan, dapat pula hendaknya menjadi rujukan bagi masyarakat pelaku dunia wisata dan masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan itu perlu adanya tokoh- tokoh penting yang senantiasa terjun ke masyarakat seperti *da'i* atau *mubbaligh* dan *mubbalighah*, jama'ah pengajian, majelis *ta'lim* dan lainnya dapat di berdayakan pula untuk mengajak masyarakat luas menggunakan fasilitas wisata seperti toilet umum, fasilitas umum dan objek wisata sebagai sesuatu yang mesti di pelihara kerapihan, kebersihan, dan kenyamanannya secara bersama-sama dan untuk kemaslahatan (kebaikan) bersama.

- 3) Para pekerja sektor wisata seperti sopir angkutan wisata, interpretor, pemandu wisata, *travel agent*, *tour leader* (pimpinan perjalanan) dan pramuwisata lainnya pada dasarnya merupakan representasi pencerminan apakah agama berperan terhadap pengembangan wisata yang ideal. Apabila mereka menjalankan tugasnya secara baik, etis atau berakhlakul karimah, dan bagi yang beragama (Islam) menjalankan ibadahnya serta menyediakan waktu pula bagi peserta wisata menjalankan ibadah mereka, maka otomatis mereka bekerja sambil beribadah.
- 4) Objek wisata yang memberikan dampak nilai-nilai spiritual yang biasa disebut wisata *ziarah* atau wisata budaya di harapkan semakin di perkaya di samping objek lainnya. Begitu pula item-item dan pajangan bernilai sejarah, kultural, dan bernuansa religi yang terdapat di museum, galeri dan sebagainya seyogyanya di perkaya dengan hasil karya dan produk serta peninggalan yang menunjukkan jati diri bahwa artefak bernuansa agama juga tertampilkan dalam visualisasi yang memadai.
- 5) Fasilitas, perlengkapan, peralatan, akomodasi dan konsumsi. Pada setiap tempat objek wisata hendaknya di samping dilengkapi dengan toko *souvenir*, toilet dan sebagainya, seharusnya di sediakan tempat sholat atau tempat ibadah serta ketersediaan air untuk berwuduk yang bersih dan memadai. Penyediaan ruangan ibadah, sajadah, kitab suci Al-Qur'an di laci meja atau fasilitas ibadah di dalam kamar atau

di ruangan lain seperti musholla dan masjid di dalam kompleks perhotelan, amatlah penting dan komplementer (saling melengkapi). Lebih dari itu, makanan dan minuman yang disajikan terutama untuk wisatawan lokal dan domestik, harus di jamin kehalalannya.<sup>17</sup>

Kemudian terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata syari'ah yakni:<sup>18</sup>

- a) Lokasi, yakni penerapan sistem Islami di era pariwisata, lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan oleh kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.
- b) Transportasi, yakni penerapan sistem, seperti pemisah tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya sehingga tetap berjalannya syari'at Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan.
- c) Konsumsi, yaitu Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, maksud segi kehalalan di sini yakni baik dari sifatnya, perolehannya, maupun pengolahannya. Selain itu suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata.
- d) Hotel, yakni seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan dengan prinsip syari'ah. Pelayanan di sini tidak hanya dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan

---

<sup>17</sup> Syekh Ahmad Bin Syekh Muhammad Zarga, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Damascus: Dar Qalam, 1989), 205-206.

<sup>18</sup> Hambali, "Tujuan Ekonomi Islam", *Dialetika.*, 45.

seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah<sup>19</sup>.

### **1. Strategi pengembangan wisata perspektif ekonomi Islam**

Strategi pengembangan wisata adalah langkah-langkah atau rencana yang dilakukan untuk menggali dan mengembangkan potensi wisata yang ada di suatu kawasan, cara yang dilakukan dapat berupa melakukan perbaikan terhadap infrastruktur yang ada baik secara fisik maupun non fisik, sehingga semua itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar daerah tujuan wisata. Menurut A. Yoeti dalam pengembangan pariwisata dalam Islam dalam hal ini pemerintah, masyarakat dan pengelola tentu menyesuaikan kegiatan pariwisatanya sesuai dengan syari'at Islam. Mulai dari kegiatan-kegiatan pariwisata, makanan, yang tentunya harus halal dan mengembangkan sumber daya pariwisatanya yang ada sehingga dapat digunakan dan menghindari dari kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan seperti tindak-tindak asusila. Selain dari hal tersebut setiap tempat wisata dilengkapi dengan mushola sebagai sarana beribadah untuk wisatawan Muslim. Namun dalam hal ini, belum tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh wisatawan secara menyeluruh disetiap obyek wisata yang ada. Dalam mengelola pariwisata daerah juga menganut prinsip-prinsip menata, merawat, memanfaatkan dan melestarikan sumber daya yang Allah SWT berikan, hal ini dapat dilihat dari:

---

<sup>19</sup> Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003), 110.

- a. Pembangunan daya tarik wisata, strategi yang di gunakan yakni:
- 1) Menumbuh kembangkan daya tarik wisata baru yang potensial.
  - 2) Mengoptimalkan daya tarik wisata yang paling diminati wisatawan yang berbasis kearifan lokal.
  - 3) Mengoptimalkan kualitas, kuantitas sarana dan prasarana wisata untuk kenyamanan wisatawan.
  - 4) Mengadakan program penyadaran masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan sadar wisata pada masyarakat disekitar obyek wisata.<sup>20</sup>

Dalam mengembangkan pariwisata sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 72 yang berbunyi:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan pikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan aat bodoh.*”<sup>21</sup>

Sedangkan yang dimaksud dalam surat ini adalah tugas kekhilafahan itu tidak lepas begitu saja tanpa diberikan kewenangan-kewenangan untuk mengelola bumi dan seisinya. Selain itu ugus

<sup>20</sup> Rahmalia, *Analisis Strategi Pengembangan Sektor.*, 133-134.

<sup>21</sup> QS. al Ahzab (33): 72.

kekhalfahan bukan tugas gratis tanpa tanpa tanggung jawaban, seperti yang telah dijelaskan dalam QS. Al-A'raf (7) ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ  
 اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa tidak takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”<sup>22</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa tugas manusia di muka bumi ini adalah menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem alam agar tidak rusak dan menyebabkan kerugian bagi seluruh makhluk di muka bumi. Karena itu, tugas ini merupakan tugas yang berkelanjutan dan berkesinambungan mulai dari menata, merawat, memanfaatkan, dan melestarikan. Keseluruhan tugas tersebut diarahkan untuk kemaslahatan umat. Pengembangan pariwisata diperlukan mulai dari fasilitas, sarana dan juga prasarana serta transportasi. Namun penggunaannya masih belum optimal, maka dari itu langkah yang diambil membangun fasilitas-fasilitas khususnya fasilitas pariwisata dan prasarana umum untuk mendukung pengembangan pariwisata dan meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana umum guna mendorong pertumbuhan daya saing wilayah pengembangan pariwisata dan untuk menimbulkan kenyamanan bagi

---

<sup>22</sup> QS. al A'raf (7): 56.

wisatawan. Berdasarkan hal tersebut, pariwisata adalah salah satu sektor yang memberikan kontribusi bagi devisa Negara melalui retribusi jasa usaha. Melihat beragamnya pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia maka sangatlah baik apabila pemerintah mengembangkannya secara berkelanjutan guna memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara juga terhadap kesejahteraan masyarakat.<sup>23</sup>

## **B. Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Pemberdayaan Masyarakat**

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*Empowerment*), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka mempunyai kekuasaan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>24</sup>

Menurut Ife, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan

---

<sup>23</sup> Rahmalia, *Analisis Strategi Pengembangan Sektor.*, 136-137.

<sup>24</sup> Suharto, *Membangun Masyarakat.*, 59.

bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien terhadap :

- a) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- b) Pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c) Ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d) Lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan sosial pendidikan, kesehatan.
- e) Sumber-sumber kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal informal dan kemasyarakatan.
- f) Aktivitas ekonomi kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi serta pertukaran dan barang atau jasa.
- g) Reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi

Sedangkan untuk kelompok lemah ada beberapa kelompok yang dapat di kategorikan, yaitu meliputi:

- a) Kelompok lemah secara struktural baik lemah secara kelas, gender maupun etnis.
- b) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja. penyandang cacat, gay dan lesbian maupun masyarakat terasing.
- c) Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.<sup>25</sup>

Menurut Richard Carver. *managing direktor Coverdale Organizational* mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya mendorong dan memungkinkan individu-individu untuk mengemban tanggung jawab pribadi atas upaya mereka memperbaiki cara mereka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka dan menyumbang pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal itu menuntut diciptakannya suatu budaya yang mendorong orang-orang di semua tingkat untuk merasa mereka bisa menghasilkan perubahan dan membantu mereka mendapatkan kepercayaan diri dan keterampilan-keterampilan untuk menghasilkan perubahan-perubahan itu.<sup>26</sup>

Ada juga yang berpendapat bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu

---

<sup>25</sup> Ibid., 59.

<sup>26</sup> David Clutterbuck dan Susan Kornaghan, *The Power Of Empowerment (Release The Hidden Talent Of Your Employees)* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2010), 3.

masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.<sup>27</sup> Program pemberdayaan masyarakat dirumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *bottom up*, dimana pada pelaksanaan di lapangan, dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dan masyarakat mulai dan kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program pembangunan ini, berhasil atau tidaknya pelaksanaan program ini ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri.<sup>28</sup> Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya menyangkut lapisan- lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang kurang mampu yang dinilai tertindas oleh sistem dan dalam struktur sosial. Upaya pemberdayaan masyarakat ini terdiri dari beberapa segi yaitu:

- 1) Penyadaran tentang peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan atau permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat.

---

<sup>27</sup> Suharto, *Membangun Masyarakat*, 60.

<sup>28</sup> Suhartini A. Halim, et. al., *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 8.

- 2) Penyadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan pada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri
- 3) Meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya yang telah dimiliki. Prosedur yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang didasarkan pada teori *empowering* adalah: *pertama*. membangkitkan (*enabling*). Pada umumnya, ketidakberdayaan terjadi karena tidak di kenalnya potensi yang dimilikinya. Pada dasarnya proses *enabling* dilakukan untuk membangkitkan kemauan rakyat yang banyak dipengaruhi oleh persepsi dan pengetahuan atas diri dan lingkungannya. *Kedua* memampukan (*empowering*), pada tahap ini bertujuan agar rakyat menjadi mampu atau bahkan lebih mampu dengan dibekali pengetahuan dan bantuan materiil. *Ketiga*. perlindungan (*protection*). yaitu proses penguatan atau perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan jalan keluar untuk beberapa kesulitan yang dihadapi.<sup>29</sup>

Dengan demikian, pemaknaan pemberdayaan masyarakat dapat di simpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat hendaknya bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada program-program pemberian, akan tetapi setiap apa yang dinikmati, harus di hasilkan atas usaha sendiri, dan hasil akhirnya memandirikan masyarakat dan

---

<sup>29</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung : Pustaka Setia, 2015), 188.

membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan. Hal tersebut sama dengan pendapat yang di kemukakan Moh. Ali Aziz yang dikutip oleh Suhartini A Halim dalam bukunya dijelaskan bahwa pemberdayaan biasanya menggunakan strategi *bottom up*, artinya masyarakat sejak awal di libatkan dalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan Hal ini disebabkan karena masyarakat itu sendiri yang mengetahui tentang kebutuhannya dan bagaimana memenuhinya.<sup>30</sup>

## **2. Tujuan Pemberdayaan**

Salah satu perwujudan nyata dari konsep pemberdayaan yang tercantum diatas, dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sejalan dengan ajaran Islam. Bahkan pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai sebagai agama gerakan atau perubahan. Konsep pemberdayaan masyarakat pun merupakan paradigma baru dalam pembangunan, dimana konsep tersebut memiliki tujuan untuk mengembangkan kemandirian masyarakat. Bentuk partisipasi yang diharapkan adalah masyarakat mampu mendefinisikan dan mencoba

---

<sup>30</sup> Halim, et, al. *Model-Model Pemberdayaan* ., 134.

memenuhi kebutuhan mereka sendiri.<sup>31</sup> Menurut Kesi Widjajanti yang ditulis dalam jurnalnya tujuan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki.

Oleh sebab itu pemberdayaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Hal tersebut diharapkan nantinya masyarakat mampu memiliki kemampuan untuk merubah keadaannya menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan mampu meningkatkan perekonomian di desa tersebut.<sup>32</sup>

Pemberdayaan masyarakat berorientasi pada kesejahteraan adalah pemberdayaan yang dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan dikembangkannya wisata di Desa Medowo ini diharapkan kehidupan masyarakat setempat lebih makmur dan sejahtera. Pemberdayaan

---

<sup>31</sup> Andi Sopandi, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat", *Madani*, 2 (Nopember, 2009), 23.

<sup>32</sup> Kesi Widjajanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat", *Ekonomi Pembangunan*, 1 (Juni, 2011), 16.

masyarakat berbasis kemitraan dalam hal ini misalnya membuka akses bagi masyarakat terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, dan manajemen yang lebih baik serta pergaulan bisnis yang lebih luas sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pemberdayaan masyarakat bersifat holistik, maksudnya mencakup semua aspek. Sumber daya lokal seperti alam, budaya, tradisi, patut didayagunakan. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata Desa Medowo ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga tidak berhenti begitu saja.<sup>33</sup>

### **C. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam**

#### **1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam**

Segala sumber daya yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Sumber daya tersebut antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal. Sumber daya alam pada dasarnya merupakan anugerah dari Allah dan disiapkan-Nya kepada manusia untuk kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai khalifah-Nya di muka bumi, harus dapat dioptimalkan dengan baik dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Islam juga memberikan di sintentif bagi *iddle saving* melalui zakat. Setiap dana yang tidak produktifkan maka jumlahnya bisa berkurang karena disebabkan zakat. Untuk itu memproduktifkan dana ke sektor riil menjadi salah satu alternatif yang paling menguntungkan

---

<sup>33</sup> Effendi. *Strategi Pengembangan.*, 2.

bagi perekonomian secara keseluruhan, apalagi diterapkan di tengah negara berkembang yang mana negara tersebut membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur perekonomian negerinya.<sup>34</sup>

Untuk itu, bagaimana caranya agar dana-dana tersebut bisa disalurkan kepada sektor-sektor yang menjadi tujuan utama dari pembangunan. Jika dilihat dari konteks Indonesia pada hari ini misalnya, penyaluran dana bagi sektor pertanian dan kelautan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini disebabkan oleh tingginya penyerapan angkatan kerja oleh sektor pertanian dan kelautan serta persoalan yang tidak kalah adalah minimnya akses pemodalan yang membelit kedua sektor tersebut. Juga bagaimana membiayai infrastruktur negara yang masih sangat lemah kualitasnya sehingga berakibat pada ekonomi biaya tinggi. Di butuhkan adanya perencanaan yang tepat, matang dan insentif kebijakan yang efektif. Islam berusaha supaya sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya agar bisa menghasilkan produksi sebanyakbanyaknya dan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pemberian kebebasan mutlak kepada hak milik, tanpa ada pencegahan terhadap pelampauan batas yang dilakukan oleh para pemilik maupun pencegahan terhadap keluarnya mereka dari jalan yang benar dalam pemanfaatan alam, merupakan aturan yang bertentangan dengan

---

<sup>34</sup> Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 23-25.

Islam.<sup>35</sup> Islam dalam pemanfaatan sumber daya alam memberikan petunjuk sebagai berikut:

- a) Al-Quran dan Sunnah memberikan peringatan bahwa alam telah ditundukan untuk umat manusia sebagai salah satu sumber rezeki
- b) Manusia adalah khalifah Allah Swt yang bertugas untuk mengatur, memanfaatkan, dan memberdayakan alam di muka bumi. Sedangkan pemilik yang hakiki adalah Allah Swt.
- c) Islam mengizinkan pemanfaatan sumber daya alam baik untuk kepentingan seseorang ataupun untuk orang banyak.
- d) Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam harus memerhatikan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Swt yaitu menjaga, memelihara dan memakmurkannya bukan merusak alam yang mengakibatkan punahnya keaslian dan keindahan alam semesta. Untuk itu ada tiga mekanisme yang ditawarkan dalam pemberdayaan sumber daya alam yaitu: pertama, diberdayakan oleh pemiliknya sendiri dengan ditanami. Kedua, diserahkan pada orang lain untuk digarap tanpa adanya kompensasi. Ketiga, memberikan otoritas kepada pihak lain untuk diberdayakan yang di ikuti dengan adanya bagi hasil setengah, sepertiga atau seperempat. Pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan sumber daya yang dapat digunakan dalam memproduksi aset-aset fisik untuk menghasilkan pendapatan.

---

<sup>35</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 34-35.

Aspek fisik tersebut antara lain tanaman, industri, mesin, dan sebagainya. Pada sisi lain, peran modal juga sangat signifikan untuk diperhatikan. Dengan demikian, proses pertumbuhan ekonomi mencakup mobilisasi sumber daya, merubah sumber daya tersebut dalam bentuk asset produktif, serta dapat digunakan secara optimal dan efisien<sup>36</sup>.

Gagasan yang ada dalam paradigma ini belum terbukti, tetapi menyadarkan bahwa betapa pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang lestari. Jika umat manusia menginginkan hidup sejahtera, maka harus memperhatikan keseimbangan ekologi dan ekosistem. Paradigma ini juga berharap masa depan bumi tidak akan terguncang hanya karena kesewenangan manusia dalam mendapatkan fasilitas yang terkandung di dalamnya.<sup>37</sup> Jika efisiensi merupakan konsep ekonomi yang didasarkan pada etika, maka konsep berkelanjutan adalah gabungan antara faktor-faktor politik. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memberi manfaat pada semua (warga masyarakat) termasuk generasi mendatang secara adil dan merata tanpa adanya suatu efek yang di rasakan untuk selanjutnya.<sup>38</sup>

Pemberdayaan masyarakat berorientasi pada kesejahteraan, dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan lahir

---

<sup>36</sup> Michael P Todaro, *Economic Development in The Third World* (New York: Longman, 1989), 432.

<sup>37</sup> Ibrahim, et. al., "Sustainable Economic Development: Concept, Principles and Management from Islamic Perspective", *Social Sciences*, (2011), 330-338.

<sup>38</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 204.

kesejahteraan. Namun kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses sinergisitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar *growth with equity* betul-betul dapat terealisasi. Namun demikian, konsep dan definisi kesejahteraan ini sangat beragam, bergantung pada perspektif apa yang digunakan. Dalam konteks ini, maka filosofi kesejahteraan, merupakan salah satu konsep yang layak untuk mendapatkan perhatian. sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. Quraisy (106) ayat 1-4 yang berbunyi:

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۝١ إِ إِلْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝٤

Artinya : “*Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.*”<sup>39</sup>

Jika merujuk pada ayat-ayat tersebut, maka konsep kesejahteraan ini memiliki empat indikator utama, keempat indikator tersebut adalah sistem nilai Islami, kekuatan ekonomi disektor riil (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, serta keamanan dan ketertiban sosial. Pada indikator

<sup>39</sup> QS. Quraisy (106): 1-4.

pertama, basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi paradigma dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan sejati tidak akan pernah bisa diraih jika kita menentang secara diametral aturan Allah Swt. Penentangan terhadap aturan Allah SWT. Justru menjadi penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkehan hidup manusia yang terkandung dalam QS. Thaha (20) ayat 124 yang berbunyi:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

Artinya : *“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.”*<sup>40</sup>

Pada indikator ke dua, kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor riil, yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Sektor inilah yang menyerap angkatan kerja yang paling banyak dan menjadi inti dari ekonomi syariah. Bahkan sektor keuangan dalam Islam didisein untuk memperkuat kinerja sektor riil, karena seluruh akad dan transaksi keuangan syariah berbasis pada sektor riil.

---

<sup>40</sup> QS. Thaha (20) :124.

Indikator ke tiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi. Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Demikian pula apabila yang bisa memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian masyarakat, sementara bagian yang lain tidak bisa. Dengan kata lain, sistem distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan, serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa kecuali yang terkandung dalam QS. Al-Hasyr (59) ayat 7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
 مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang*

*kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”*<sup>41</sup>

Sedangkan indikator yang ke-empat, kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antar-kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan di minimalisir. Tidak mungkin kesejahteraan akan dapat diraih melalui rasa takut dan tidak aman.<sup>42</sup>

Pemberdayaan dalam Islam mengandung tiga misi diantaranya;

- a) Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis.
- b) Pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syariah yang harus menjadi ciri kegiatan umat Islam
- c) Membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.<sup>43</sup>

## **2. Strategi Pengembangan Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam**

Menurut Asy'arie Dalam pemberdayaan ekonomi menurut Islam diperlukan adanya pembelajaran dalam agama untuk menjelaskan tentang ekonomi dan makna kekayaan menurut Islam.

---

<sup>41</sup> QS. al Hasyr (59): 7.

<sup>42</sup> Irfan Syauqi beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 28-29.

<sup>43</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial, Ekonomi* (Yogyakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), 389.

Dan perlu pula untuk ditekankan dalam konteks fiqh bahwa untuk menjadi seseorang yang kaya harus dilakukan dengan cara yang baik dan bermoral. Serta perlu untuk dijelaskan bahwa masyarakat perlu untuk membuat suatu karya dan melihat potensi yang ada disekitar, sehingga masyarakat dapat menjadi wirausahawan yang memiliki watak yang kuat dan siap untuk menghadapi persaingan ekonomi global. Ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk di pilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat yakni sebagai berikut:

1. Mengadakan pelatihan usaha dari pemerintah kepada masyarakat guna memperoleh pemahaman tentang konsep-konsep dalam kewirausahaan. Didalam mencapai kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dan ibadah kepada Allah SWT.

2. Permagangan

Adalah melakukan permagangan masyarakat pada perusahaan yang sesuai dengan pilihan masyarakat untuk membuka usaha.

3. Melakukan penyusunan proposal ini dapat menciptakan kerja sama dengan beberapa lembaga perekonomian.

4. Permodalan

Permodalan yang berbentuk uang ini merupakan faktor yang penting dalam menjalankan usaha, namun bukan yang paling terpenting. Maka untuk memperoleh modal ini perlu dilakukan

hubungan kerja sama yang baik dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun bantuan dana yang berasal dari kemitraan.

#### 5. Pendampingan

Dalam menjalankan usaha, diperlukan adanya tenaga pendamping yang profesional yang mana akan mengarahkan wirausahawan untuk menjalankan usahanya lebih baik. Pendampingan ini diperlukan ketika wirausahawan tidak mampu dalam mengendalikan usaha yang dijelankannya.

#### 6. Jaringan Bisnis

Yaitu pengelompokan wirausahawan sesuai dengan bidang dan potensi yang dijalankan antara satu daerah dengan daerah, sehingga dengan begitu diharapkan dapat menciptakan hubungan bisnis yang saling melengkapi, memperkuat dan bahkan dapat memperluas pasar.

Dalam memberdayakan ekonomi masyarakat tidak cukup dengan penyediaan sarannya agar dapat melatih keterampilan masyarakat. Tetapi yang sangat dibutuhkan adalah usaha untuk dapat menciptakan wawasan dan semangat masyarakat dalam berwirausaha. Tujuan dari peran pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut Islam adalah, untuk menciptakan kesejahteraan atau *maqasid syariah* bagi seluruh masyarakat, dan bukan sekelompok bagian ataupun individual. Adapun

tujuan ingin dicapai dalam pemberdayaan masyarakat agar dapat memperoleh *maqāṣid syariah* adalah:

1. Dapat terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat Dengan sumber daya alam yang tersedia, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, namun karena sumber daya alam tersebut terbatas, maka perlulah untuk membatasi pengambilan sumber daya, pengambilan sumber daya dilakukan hanya untuk kebutuhan masyarakat umum dan bukan individual, dan yang lebih diutamakan adalah masyarakat yang miskin.
2. Sumber penghasilan yang diperoleh masyarakat merupakan sumber yang halal setiap individu dari masyarakat. Diwajibkan untuk mencari nafkah agar dapat menjamin kehidupan keluarganya, maka setiap dari masyarakat wajib untuk memperoleh peluang yang sama untuk mencari nafkah dengan jujur dan adil.
3. Dapat menciptakan pertumbuhan dan stabilitas Agar dapat terealisasinya pemenuhan kebutuhan masyarakat, maka perlunya stabilitas dalam ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang baik untuk mengurangi kesenjangan yang berlebihan antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid.,390.